

Peran Program Kampung Iklim dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung

Iin Endah Setyawati¹, Heri², Mochamad Riko Wandan³,
dst.

^{1,2,3} Universitas Al-Ghifari

*Korespondensi: iin.endah19@gmail.com

(Diterima oleh Dewan Redaksi: xx-xx-xxxx)
(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 30-04-2025)

ABSTRAK

Program Kampung Iklim merupakan inisiatif pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Kampung Iklim khususnya dalam aspek penanganan sampah di Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ProKlim telah berjalan dengan melibatkan pemerintah kelurahan, kader lingkungan, dan masyarakat melalui kegiatan pengomposan, pengelolaan maggot, dan bank sampah. Namun, terdapat hambatan signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, distribusi fasilitas yang belum merata, komunikasi yang belum optimal, serta koordinasi antar *stakeholder* yang masih lemah. Upaya penanggulangan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan komunikasi publik, pengembangan kemitraan lintas sektor, dan integrasi ProKlim dalam agenda pembangunan kelurahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran khusus dan pemerataan fasilitas pengelolaan sampah untuk mengoptimalkan keberlanjutan program.

Keywords: Kampung Iklim, penanganan sampah, mitigasi perubahan iklim, partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah berkelanjutan

Iin Endah Setyawati, Heri dan M. Riko Wandana. 2025. Peran Program Kampung Iklim dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung

A. PENDAHULUAN

Perubahan iklim global telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia di abad ke-21. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim, berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca melalui berbagai strategi mitigasi dan adaptasi. Salah satu kontributor signifikan emisi gas rumah kaca adalah sektor limbah,

khususnya pengelolaan sampah yang belum optimal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Kota Bandung menghadapi permasalahan serius terkait pengelolaan sampah, dengan produksi rata-rata mencapai 1.477 ton per hari pada tahun 2023, didominasi oleh sampah organik (PD Kebersihan Kota Bandung, 2023). Kondisi ini memerlukan pendekatan inovatif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Kelurahan Cisaranten Endah, yang terletak di Kecamatan Arcamanik, merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan kompleksitas permasalahan sampah yang signifikan. Dengan luas wilayah 2,85 km² dan jumlah penduduk 25.847 jiwa, kelurahan ini menghasilkan timbulan sampah sebesar 155 ton per hari (BPS Kota Bandung, 2023). Keterbatasan lahan dan akses transportasi sampah yang terbatas menjadikan pengelolaan sampah di wilayah ini semakin menantang.

Merespons permasalahan tersebut, Pemerintah Kelurahan Cisaranten Kulon berupaya mencari solusi dengan mengadaptasi pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) yang pada awalnya diinisiasi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui aksi lokal yang terukur (KLHK, 2019). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, ProKlim bertujuan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Implementasi Program Kampung Iklim di Kelurahan Cisaranten Endah dimulai pada tahun 2021 dengan fokus utama pada penanganan sampah rumah tangga. Program ini melibatkan berbagai *stakeholder*, mulai dari pemerintah kelurahan, organisasi masyarakat, sektor swasta, hingga lembaga pendidikan. Dalam hal ini, Kelurahan memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun, implementasi ProKlim menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program.

B. KAJIAN PUSTAKA

B.1 Konsep Program Kampung Iklim

Program Kampung iklim merupakan kegiatan yang memadukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dan berbagai pihak pendukung seperti pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintah. Pelibatan para pemangku kepentingan yang efektif serta pengelolaan pengetahuan adaptasi dan mitigasi perubahan di tingkat tapak merupakan salah satu aspek

penting untuk mencapai target pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional maupun global (Rizan Hasbullah, Wahib Assyahri, 2025)

Dikutip dari Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim No P.4/PPI/API.O/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim program kampung iklim yang selanjutnya disebut Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk meningkatkan ketahanan iklim, menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca (GRK) serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat local sesuai dengan kondisi wilayah.

Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, yang mencakup komponen utama, syarat pengusulan, penilaian dan kategori Proklim. Adapun Proklim dapat dikembangkan dan diterapkan di wilayah dengan cakupan minimal setingkat Dusun, RT atau RW, serta maksimal setingkat Desa atau Kelurahan.

B.2 Konsep tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan sistem yang mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam upaya mengurangi dampak negatif sampah terhadap ekosistem dan masyarakat. Secara sederhana, sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan (akhirnya dibuang) setelah suatu proses selesai atau berakhir, sehingga dapat dinyatakan bahwa sampah adalah konsep yang ditujukan pada manusia sekaligus konsekuensi dari adanya olah aktifitas manusia (Kahfi, 2017).

Di Indonesia, konsep pengelolaan sampah berkelanjutan telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Regulasi ini menekankan pada paradigma baru pengelolaan sampah yang berbasis pada pengurangan dan penanganan sampah, dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat sebagai produsen sampah. Secara sederhana, sampah merupakan materi,

bahan maupun segala sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu merupakan sisa atau residu maupun buangan. Meski demikian, dalam konsep perundang-undangan, sampah dapat pula muncul, ada maupun timbul akibat proses alam yang berbentuk padat.

Menurut Kuncoro Sejati (2009: 24), pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara umum, dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan, dan pembuangan akhir (Kholisussa'di, 2019)

B.3 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan apakah tujuan kebijakan dapat tercapai atau tidak. Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai "*actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions.*"

Model implementasi yang relevan untuk menganalisis Program Kampung Iklim adalah model implementasi bottom-up yang dikembangkan oleh Lipsky (1980) tentang street-level bureaucracy. Model ini menekankan pada peran implementor di tingkat bawah (*street-level bureaucrats*) dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Dalam konteks ProKlim, peran kader lingkungan, tokoh masyarakat, dan aparatur kelurahan menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan program.

Selain itu, salah satu teori implementasi yang paling berpengaruh dikembangkan oleh George C. Edward III. Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu **komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi**. Teori ini menjadi dasar untuk menganalisis dinamika implementasi suatu kebijakan, termasuk dalam konteks Program Kampung Iklim (ProKlim). Dalam konteks ProKlim, peran kader lingkungan, tokoh masyarakat, dan aparatur kelurahan menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan program.

Komunikasi berperan penting dalam menyampaikan maksud kebijakan dari perancang kepada pelaksana dan masyarakat. Sumber daya mencakup sumber daya manusia,

finansial, informasi, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Disposisi pelaksana merujuk pada sikap, komitmen, dan pemahaman terhadap kebijakan, sedangkan struktur birokrasi menyoroti prosedur kerja dan mekanisme koordinasi antaraktor pelaksana (Edward III, 1980). Kerangka ini membantu peneliti mengurai berbagai faktor yang dapat menghambat atau mendorong keberhasilan implementasi ProKlim di tingkat kelurahan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) untuk menganalisis implementasi Program Kampung Iklim dalam penanganan sampah di Kelurahan Cisaranten Endah. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada sifat penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena implementasi program secara mendalam dan komprehensif, termasuk proses, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak program terhadap masyarakat (Creswell, 2018).

Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi isu yang terjadi pada saat ini dan menjadi persoalan yang hangat berkembang di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, implementasi Program Kampung Iklim tidak dapat dipisahkan dari karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis Kelurahan Cisaranten Endah.

Subjek penelitian/informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan Cisaranten Kulon dan Kader Program Kampung Iklim kelurahan dan kader lingkungan di tingkat RW serta masyarakat peserta program seperti ibu rumah tangga dan pemuda yang aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung kegiatan pengelolaan sampah dalam Program Kampung Iklim, seperti pemilahan, pengolahan, edukasi, dan koordinasi antarpihak. Wawancara mendalam dilakukan guna menggali informasi terkait implementasi, tantangan, dan dampak program.

D. Hasil dan Pembahasan

D.1 Gambaran Umum Kelurahan Cisaranten Endah

Kelurahan Cisaranten Endah terletak di bagian timur Kota Bandung dengan luas wilayah 2,85 km² dan ketinggian 750-850 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandung (2023), kelurahan ini memiliki jumlah penduduk 25.847 jiwa yang terdiri dari 8.456 kepala keluarga dengan kepadatan penduduk mencapai 9.069 jiwa per km².

Karakteristik topografi Kelurahan Cisaranten Endah yang berbukit dengan kemiringan lahan 15-25% menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah. Akses kendaraan pengangkut sampah terbatas pada jalan-jalan utama, sementara permukiman di daerah lereng sulit dijangkau oleh armada persampahan konvensional. Kondisi ini menyebabkan banyak titik penumpukan sampah liar, terutama di sepanjang bantaran sungai dan lahan kosong.

Komposisi sampah di kelurahan ini didominasi oleh sampah organik (65%), sampah plastik (20%), kertas (10%), dan jenis sampah lainnya (5%). Timbulan sampah rata-rata mencapai 0,6 kg per orang per hari, sehingga total produksi sampah kelurahan mencapai 155 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 70% yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sementara sisanya dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui pembakaran, penimbunan, atau pembuangan ke badan air.

D.2 Implementasi Program Kampung Iklim dalam Penangan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cisaranten Kulon

Program Kampung Iklim (ProKlim) bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam mitigasi perubahan iklim, salah satunya melalui pengelolaan sampah. Di Kelurahan Cisaranten Endah, ProKlim difokuskan pada pemilahan sampah, penguatan bank sampah, dan edukasi lingkungan. Warga dilibatkan dalam kegiatan pengomposan dan daur ulang, dengan dukungan fasilitas dari pemerintah kelurahan. Namun, tantangan tetap ada, seperti perilaku warga yang belum konsisten, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi yang belum optimal.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam Penanganan Sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Cisaranten Endah Kota Bandung, peneliti menggunakan komponen analisis indikator implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III

yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu :

D.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Cisaranten Endah, komunikasi dianalisis melalui tiga aspek utama: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Proses transmisi komunikasi berjalan secara berjenjang dari kelurahan ke tingkat RW dan RT, kemudian ke masyarakat melalui berbagai forum warga. Media komunikasi yang digunakan cukup beragam dan didukung oleh penggunaan bahasa yang mudah dipahami.

Kejelasan komunikasi terkait tujuan dan prosedur program umumnya dapat diterima masyarakat. Namun, beberapa warga masih memerlukan penjelasan tambahan terkait teknis pengolahan sampah, terutama dalam pemanfaatan maggot dan pengelolaan limbah organik. Aparat kelurahan dan dinas terkait turut berperan aktif dalam proses sosialisasi melalui pelatihan dan edukasi langsung.

Konsistensi komunikasi antarlevel pelaksana cukup baik, namun belum merata di semua RW dan RT. Beberapa wilayah belum menerima informasi secara simultan dan seragam. Tantangan juga muncul dalam upaya mengubah budaya lama membuang sampah ke sungai. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan sinergis dengan wilayah hulu untuk memperkuat dampak ProKlim.

D.2.2 Sumber Daya

Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Dalam konteks Program Kampung Iklim (ProKlim), sumber daya mencakup empat dimensi: manusia, finansial, fasilitas, dan informasi. Sumber daya manusia merupakan elemen penting karena pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kesiapan, kompetensi, dan komitmen aktor pelaksana. Di Kelurahan Cisaranten Endah, pengelolaan sampah dilakukan oleh berbagai unsur, seperti aparat kelurahan, kader lingkungan, pengelola program, serta relawan masyarakat. Masing-masing memiliki peran spesifik, meskipun keterbatasan kapasitas teknis dan jumlah personel masih menjadi kendala. Banyak pelaksana bekerja secara sukarela dengan

dukungan pelatihan terbatas. Ketimpangan jumlah personel menyebabkan beban kerja menumpuk pada individu tertentu, sehingga menurunkan efektivitas program. Selain itu, keterlibatan masyarakat belum merata, dan keberhasilan program sangat bergantung pada individu yang aktif. Situasi ini menuntut adanya penguatan kapasitas dan distribusi tugas yang lebih merata agar pelaksanaan ProKlim dapat berjalan optimal. Sumber daya yang terorganisasi, terlatih, dan berkelanjutan menjadi kunci penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara partisipatif di tingkat lokal.

a. Sumberdaya Manusia

Dalam perspektif Edward III, dimensi sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari dimensi lainnya, seperti komunikasi dan struktur birokrasi. Pelaksana kebijakan yang memiliki kapasitas tinggi pun tidak akan berfungsi secara optimal jika tidak diberikan informasi yang jelas dan tidak didukung oleh sistem kelembagaan yang efektif. Sebaliknya, struktur dan komunikasi yang baik akan sia-sia apabila tidak ada pelaksana yang mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan jantung dari implementasi kebijakan publik. Dalam konteks Program Kampung Iklim, penguatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi prioritas utama, melalui peningkatan jumlah kader dan relawan, penyediaan pelatihan yang sistematis, pemberian insentif yang proporsional, serta pengembangan mekanisme koordinasi yang sinergis antar pelaku. Hanya dengan dukungan sumber daya manusia yang kuat dan berkomitmen, kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

b. Sumber Daya Finansial

Dimensi sumber daya finansial dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Cisaranten Endah menghadapi berbagai tantangan. Dana utama berasal dari alokasi kelurahan dan dukungan insidental dari Dinas Lingkungan Hidup serta swadaya masyarakat. Namun, anggaran yang tersedia terbatas dan belum mencukupi untuk kebutuhan jangka panjang seperti pembangunan TPST atau pelatihan teknis. Proses birokratis dalam pencairan dana juga sering menghambat kegiatan. Minimnya akses terhadap sumber dana alternatif seperti CSR dan lemahnya tata kelola anggaran membuat

program rentan tidak berkelanjutan. Diperlukan perencanaan dan pengelolaan dana yang lebih transparan dan terintegrasi.

c. Sumber Daya Fasilitas

Dalam pelaksanaan ProKlim, ketersediaan fasilitas seperti TPS, rumah kompos, dan alat pengelolaan sampah menjadi penunjang penting. Di Kelurahan Cisaranten Endah, beberapa fasilitas dasar telah tersedia, seperti tempat sampah terpilah, kotak maggot, dan kendaraan pengangkut sampah. Namun, distribusinya belum merata di seluruh RW dan kapasitasnya masih terbatas. Fasilitas teknis seperti mesin pencacah dan komposter skala besar belum tersedia, sehingga pengolahan sampah hanya dilakukan secara sederhana di tingkat rumah tangga. Perencanaan pengadaan fasilitas juga belum berbasis kebutuhan jangka panjang dan minim koordinasi lintas dinas, yang menyebabkan banyak kebutuhan fasilitas belum terpenuhi. Keterbatasan ini berdampak langsung pada efektivitas dan jangkauan program ProKlim di lapangan.

d. Sumber Daya Informasi

Akses informasi mengenai ProKlim telah disosialisasikan melalui berbagai forum warga. Namun, penyebarannya belum merata, dan masih banyak warga yang belum memahami peran mereka dalam program. Informasi teknis, media edukasi, serta sistem dokumentasi kegiatan juga masih terbatas. Kurangnya keterbukaan informasi dari instansi terkait memperlemah koordinasi lintas aktor. Optimalisasi pengelolaan informasi menjadi kunci penting dalam meningkatkan partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan program ProKlim.

D.2.3 Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Cisaranten Endah, disposisi yang positif terlihat dari antusiasme kader lingkungan, RT/RW, dan aparat kelurahan dalam menjalankan program penanganan sampah. Mereka menunjukkan inisiatif seperti menyelenggarakan lomba kebersihan, pelatihan pengomposan, hingga kerja sama dengan komunitas lingkungan dan perguruan tinggi. Dukungan aparat juga terasa dalam bentuk fasilitasi kegiatan dan pengakuan terhadap inisiatif warga. Namun, sebagian pelaksana masih menganggap ProKlim sebagai beban tambahan karena kurangnya insentif. Sikap seperti ini bisa menghambat keberlanjutan program. Oleh karena itu,

keberhasilan ProKlim sangat bergantung pada disposisi pelaksana—jika mereka memiliki semangat dan rasa tanggung jawab tinggi, maka program lebih mungkin berhasil dan diterima oleh masyarakat secara luas.

D.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam ProKlim di Kelurahan Cisaranten Endah, struktur pelaksana bersifat semiformal dan berbasis partisipatif. Kelurahan bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sementara pelaksanaan dilakukan oleh tim kelurahan, RW, dan kader lingkungan. Namun, belum semua RW memiliki SOP atau pedoman kerja yang jelas. Koordinasi dan pelaporan dilakukan dari RW ke kelurahan, lalu ke kecamatan dan DLH Kota. Meski ada panduan teknis dari KLHK dan DLH, beberapa aspek seperti pengelolaan maggot masih minim panduan. Lemahnya struktur birokrasi menyebabkan kendala dalam monitoring, pelaporan, dan keberlanjutan, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga.

D.2.3 Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Cisaranten Endah menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, terutama dalam empat dimensi menurut teori George C. Edwards III. Pertama, dari segi **komunikasi**, informasi tentang tujuan dan cara kerja ProKlim belum tersampaikan merata, sosialisasi tidak menyeluruh, sehingga partisipasi warga masih rendah. Kedua, dalam hal **sumber daya**, kelurahan mengalami keterbatasan SDM, dana, informasi, dan fasilitas pendukung. Misalnya, tidak semua RW memiliki kader lingkungan, alat pengelolaan sampah, atau pelatihan yang cukup. Ketiga, pada **disposisi pelaksana**, meskipun ada semangat dari kader dan warga, kurangnya insentif, pelatihan, dan dukungan membuat motivasi menurun, dan banyak warga masih menganggap pengelolaan sampah sebagai tugas pemerintah. Keempat, dari aspek **struktur birokrasi**, belum ada sistem formal yang menangani ProKlim secara khusus. Koordinasi dan pelaporan antar RW, kelurahan, dan dinas teknis masih lemah. Ketiadaan struktur kelembagaan yang baku membuat keberlanjutan program terhambat, terutama saat terjadi pergantian aparat atau pengurus RW.

D.2.4 Upaya Mengatasi Hambatan

Kelurahan Cisaranten Endah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim), khususnya dalam pengelolaan sampah. Beberapa langkah strategis meliputi: pelatihan bagi kader lingkungan, petugas Goper, dan pengelola bank sampah; pengadaan alat pendukung seperti komposter dan pencacah melalui Musrenbang dan CSR; pemanfaatan media sosial dan edukasi publik untuk sosialisasi; pembentukan forum koordinasi lintas RW; serta pemberdayaan kelompok lingkungan seperti bank sampah dan posyandu hijau. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran warga dan membangun budaya peduli lingkungan. Meski tantangan masih ada, pendekatan kolaboratif dan adaptif ini menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan kebijakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.

E. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam penanganan sampah di Kelurahan Cisaranten Endah. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi ProKlim sudah berjalan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah kelurahan, kader lingkungan, dan masyarakat. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan meliputi pengomposan, budidaya maggot, dan pengelolaan bank sampah. Namun, implementasi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga, dana, fasilitas yang belum merata, arus informasi yang kurang optimal, serta lemahnya koordinasi antar pelaksana.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan pelatihan SDM, peningkatan komunikasi publik, dan integrasi ProKlim ke dalam program pembangunan kelurahan. Pendekatan kolaboratif ini membantu memperkuat efektivitas kebijakan.

Sebagai saran, pemerintah kelurahan sebaiknya membentuk forum koordinasi antar stakeholder yang rutin dan aktif, memperkuat pelatihan pengelolaan sampah bagi masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta atau program CSR untuk mendukung pendanaan. Selain itu, pemerataan fasilitas pengelolaan sampah berbasis RW dan pemanfaatan media digital untuk sosialisasi ProKlim juga penting dilakukan agar manfaat program ini dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2021. Rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim 2020-2024. BAPPENAS.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2023. Kota Bandung dalam angka 2023. BPS Kota Bandung.
- Creswell, J. W. 2018. *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. 2019. Pengelolaan sampah perkotaan. ITB Press.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. 2023. Laporan status lingkungan hidup daerah Kota Bandung 2023. DLH Kota Bandung.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hasbullah, Rizan dan Assyahri, Wahab. 2025. Tinjauan Implementasi Program Kampung Iklim di Indonesia. *Journal of Public Administration and Management Studies: Volume 3, Number1, 2024*, pp 1-11 Online ISSN : 3025-2806
- Kholisussa'di. 2019. Implementasi Program Pemanfaatan Limbah Sampah Rumah Tangga di Kampung Wisata Binaan Bank Sampah NTB Mandiri. *Jurnal Transformasi: Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2019*. PLS FIP IKIP Mataram.
- Kahfi, Ashabul. Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurnal Jurisprudentie: Volume 4 Nomor 1 Juni 2017*.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of The Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

